

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN FISKAL, KEMISKINAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LUWU UTARA

KHUSNUL KHATIMA IRAWAN



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN FISKAL, KEMISKINAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LUWU UTARA

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

**KHUSNUL KHATIMA IRAWAN
A11116503**



kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN FISKAL, KEMISKINAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LUWU UTARA

Disusun dan diajukan oleh

KHUSNUL KHATIMA IRAWAN
A11116503

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 22 Desember 2020

Pembimbing I



Dr. Hamrullah, SE., M.Si.
NIP.19681221 199512 1 001

Pembimbing II



Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si.
NIP.19770913 200212 2 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sarusi Fattah, SE., M.Si.
NIP 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

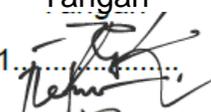
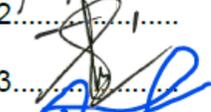
ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN FISKAL, KEMISKINAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LUWU UTARA

disusun dan diajukan oleh

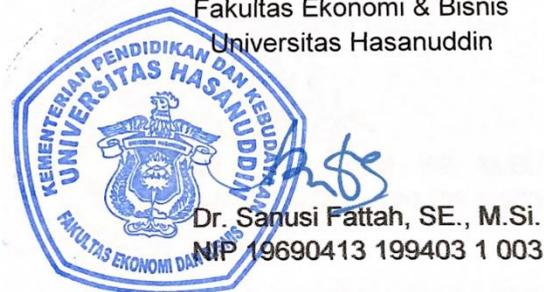
KHUSNUL KHATIMA IRAWAN
A11116503

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **22 Desember 2020**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Hamrullah, SE., M.Si.	Ketua	1..... 
2	Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si.	Sekretaris	2..... 
3	Drs.H. A. Baso Siswadharna, M.Si	Anggota	3..... 
4	Dr. Sabir, SE., M.Si.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Khusnul Khatima Irawan**
Nomor Pokok : A11116503
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Pengaruh Kemandirian Fiskal, Kemiskinan dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Utara*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 22 Desember 2020

Yang Menyatakan



(Khusnul Khatima Irawan)

A11116503

PRAKATA



-Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh-

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Tidak lupa shalawat dan salam kami hanturkan kepada Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang dengan segala keistimewaannya menjadi suri tauladan bagi seluruh ummat manusia di muka bumi.

Skripsi dengan judul “**Analisis Pengaruh Kemandirian Fiskal, Kemiskinan, Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin jurusan Ilmu Ekonomi. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapatkan bantuan baik berupa bimbingan dan saran dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya secara khusus kepada kedua orang tua saya, bapak Irawan Kapeng S.sos dan mama Hayati S.Pd yang telah menjadi orang tua yang sabar dalam membesarkan, merawat dan mendidik serta segala kasih sayang yang tulus, perhatian dan pengorbanan yang begitu besar serta doa yang tiada henti

dipanjatkan untuk penulis. Serta kepada ibu Juita S.Pd yang telah berjasa besar dalam membesarkan dan pendidik serta mengajarkan banyak hal dan memberikan banyak kasih sayang serta dukungan moril, semoga Allah SWT memberi kesehatan, panjang umur, serta menjaga setiap langkah kalian dimuka bumi ini.

Kepada kakak perempuan peneliti Reski Prastika Irawa S.H. terima kasih telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi, kemudian kepada adik laki-laki tersayang peneliti Muh. Iqra irawan. Terima kasih telah meberikan banyak kekuatan serta keiklasan dalam membantu peneliti selama ini. Serta Almahrum Fadly Karisma Irawan yang akan selalu dikenang oleh penulis. Dan kepada seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan.

Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- ♥ Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
- ♥ Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Kadir, SE.,M.Si.,CIPM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Hj. Mahlia Muis, SE., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, SE., M.Si., AK., CA. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Bapak Dr. H Madris, SE., DPS., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- ♥ Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si. Selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi. Terimakasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi. Demikian halnya peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada ibunda Dr. Nurdwiana Sari Saudi, SE.,M.Si Selaku Sekertaris

Departemen Ilmu Ekonomi yang telah memberikan dukungan dan dorongan untuk kami dalam menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.

- ♥ Bapak Dr. Hamrullah , SE., M.Si. Selaku Dosen Penasehat Akademik dan juga Pembimbing I dan Ibunda Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si Selaku Pembimbing II. Terima kasih peneliti ucapkan sedalam-dalamnya atas bimbingan, saran, dan waktu yang telah diberikan kepada saya selama menyusun skripsi ini. Peneliti mohon maaf sedalam-dalamnya, apabila selama menjadi mahasiswa bimbingan, peneliti tidak sengaja melakukan kesalahan berupa perilaku maupun lisan yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan Bapak dan Ibu.
- ♥ Bapak Drs.H. A. Baso Siswadharna, M.Si dan Dr. Sabir, SE., M.Si. selaku Dosen Penguji. Terima kasih peneliti ucapkan atas bimbingan dan saran yang diberikan kepada peneliti untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- ♥ Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan serta bimbingan kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
- ♥ Segenap pegawai Departemen Ilmu Ekonomi, Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan E-Library Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Teruntuk Pak Asfar dan Pak Safar serta Pak Bur, peneliti ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya karena telah membantu peneliti selama menjadi mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan

studi di Universitas Hasanuddin. Juga termasuk Ibu Saharibulan dan Ibu Susi yang telah membantu peneliti dalam mengurus administrasi.

- ♥ Teruntuk para sahabat yang sudah seperti rumah untuk pulang Sari Putri, Mithe, Melin, Giput, Ayu, Hera terima kasih telah menjadi tempat ternyaman untuk pulang dan berbagi cerita. Teruntuk Algifari, dan Elul terimakasih sudah menjadi laki-laki hebat yang selalu menemani selama jauh dari keluarga.
- ♥ Teruntuk get married Elul, Ulfa dan Wulan terima kasih telah menjadi sahabat yang hebat sejak masa putih abu-abu hingga sekarang.
- ♥ Teruntuk kumpulan manusia yang paling ku syukuri selama menjadi mahasiswa K8: A.Tanti Rahayu a.k Ayu Ocil, manusia paling unik luar biasa terima kasih sudah menjadi teman yang bisa diandalkan saat jauh dari rumah, Megawati Mahmud a.k Megiii, manusia kagetan baik hati dan paling sabar di perkumpulan ini terima kasih sudah selalu membantu dan sabar menghadapi kejahilan-kejahilan, Muh. Kifli fathahilla a.k Kiflii, one and only best men diperkumpulan ini terima kasih untuk segala kebaikan dan perhatiannya , Nurwahida Ramadhani Ely a.k widiely, manusia paling bijak di perkumpulan ini terima kasih sudah menjadi pendengar dan penengah yang baik, Ariska Devita Asril a.k Eyy, manusia special diperkumpulan ini terima kasih telah membuat masa-masa kuliah menjadi lebih berwarna dan asik, gita kartika Rerung Allo a.k gita, manusia dengkor yang tingkat kepeduliannya sama orang terdekatnya sangat-sangat besar dan terima kasih telah menjadi teman yang luar biasa, Nurul Ulfa Yani a.k ulpaaa, manusia lelet di perkumpulan ini terima kasih sudah menjadi

manusia dengan kepala dingin dan selalu membuka pintu rumah untuk kami.

- ♥ Teruntuk jamila tim kerja skripsi: kdilla terima kasih telah membantu dan menjadi tempat bertanya segala hal, tenry suteng terimakasih telah bertahan hingga akhir dalam menyelesaikan hal sulit ini dan juga Ocil lope yu.
- ♥ Teruntuk PASHA: Aulia Fai, Wayyu, Alif, Canul, Yasmin, ocil, eyy, kifli, kdilla, suteng, mega terima kasih atas bantuannya dan terima kasih telah menjadi teman-teman yang bisa diandalkan.
- ♥ Teruntuk Dear M: Fingki, Mega, Kifli terima kasih selalu meluangkan waktu untuk berkumpul.
- ♥ Teruntuk SPHERE 2016 terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dan berbagi momen membahagiakan bersama serta terimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga menyelesaikan tugas akhir ini.
- ♥ Teruntuk teman KKN Reguler Bone Gel. 102 Universitas Hasanuddin, Khususnya anak-anak cempniga hitzz yaitu Agung, Diki, Andry, Elma, Nina, Relly, Hasda, Indah terima kasih telah membuat masa-masa berKKN jadi lebih indah dan bermakna.
- ♥ Teruntuk Member NCT : Jaemin, Jaehyun, Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Chenle, Jisung, Taeil, Taeyong, Johnny, Yuta, Kun, Doyoung, Ten, Win-Win, Jungwoo, Lucas, Hendery, Xiaojun, Yang-Yang, Sungchan dan Shotaro terima kasih telah menemani sejak awal menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa tingkat akhir sert terimakasih atas segala hiburan dan musik yang diberikan selama menjadi NCTZen yang menjadi penyemangat dalam

menyelesaikan studi hingga tugas akhir dan menjadi penyelamat di tahun 2020 yang menjadi tahun terberat bagi penulis.

- ♥ Terakhir teruntuk Covid-19 terima kasih telah mengajarkan arti bersabar semoga anda cepat berlalu dan jangan kembali lagi.

ABSTRAK

Analisis Pengaruh Kemandirian Fiskal, Kemiskinan Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Utara

Khusnul Khatima Irawan
Hamrullah
Retno Fitrianti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara. variabel yang digunakan adalah variabel kemandirian fiskal, kemiskinan, dan pendidikan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari literatur yang terkait dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi, kemandirian fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.

Kata kunci :Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Fiskal, Kemiskinan, Pendidikan

The purpose of this study was to analyze the factor that influence economic growth in Kabupaten Luwu Utara. the variabel used in this study is fiscal independence, poverty and education. The type of data used is secondary data from literature related to this study. The analytical method used is multiple linear regresion method. Based on result of regresion analyze, fiscal independence have a postive and significant effect on economic growth, poverty does not affect on economic growth, and education have a negative and significant effect on economic growth in Kabupaten Luwu Utara.

Keyword : *Economic Growth, Fiscal Independence, Poverty, Education*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.2 Kemandirian Fiskal	14
2.1.3 Kemiskinan	17
2.1.4 Pendidikan.....	20
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	22
2.2.1 Hubungan antara Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	22
2.2.2 Hubungan antara Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	23
2.2.3 Hubungan antara Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	24
2.3 Tinjauan Empiris.....	25
2.4 Kerangka Pikir	28
2.5 Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Lokasi penelitian	30

3.2 Jenis Dan Sumber Data	30
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.4 Metode Analisis.....	31
3.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda	31
3.5 Uji Hipotesis	32
3.5.1 Uji Koefisien Determinasi.....	32
3.5.2 Uji Signifikan Simultan (uji statistik F).....	32
3.5.3 Uji Statistik t.....	33
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1 Keadaan Geografis	35
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian.....	36
4.2.1 perkembangan Pertumbuhan ekonomi di Luwu Utara Tahun 2005-2019.....	36
4.2.2 Perkembangan Kemandirian fiskal di Luwu Utara Tahun 2005-2019.....	38
4.2.3 Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara 2005-2019.....	41
4.2.4 Perkembangan pendidikan di Kabupaten Luwu Utara 2005-2019	43
4.3 Hasil Estimasi Variabel – Variabel Penelitian	45
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	46
4.4.1 Analisis Hasil Estimasi Pengaruh Kemandirian Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	46
4.4.2 Analisis Hasil Estimasi Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi....	47
4.4.3 Analisis Hasil Estimasi Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi....	48
BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
L A M P I R A N.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.....	2
Tabel 1.2 Kualifikasi Kemandirian Fiskal.....	8
Tabel 4.3.1 Hasil Estimasi Fungsi Pertumbuhan Ekonomi Luwu Utara.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 kemandirian Fiskal di Kabupaten Luwu Utara	7
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi di Luwu Utara tahun 2005-2019	36
Gambar 4.2.2 kemandirian fiskal di Kabupaten Luwu Utara 2005-2019.....	38
Gambar 4.2.3 Kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara 2005-2019.....	42
Gambar 4.2.4. Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara 2005-2019.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Hal ini dapat terwujud melalui kebijakan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan secara bersama-sama pada tanggal 1 Januari 2001. Kebijakan ini dipandang sangat demokratis karena sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatut asas desentralisasi secara bersama-sama. Otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah, karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, menuntut pemerintah daerah untuk semakin mampu mendanai aktivitas pemerintah dan pembangunan dengan kemampuan sendiri, artinya daerah diharapkan dapat mandiri, mempunyai keuangan daerah yang mantap sehingga daerah seharusnya tidak lagi terlalu menggantungkan diri pada dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil lainnya, yang jumlahnya sangat terbatas bagi beberapa daerah. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah otonom yang mandiri, perlu dilihat lagi faktor-faktor seperti sumberdaya manusia dan faktor dana yang dimiliki oleh

masing-masing daerah. Faktor dana ini dapat dilakukan dengan mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Untuk itu diperlukan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (Elita 2007).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian fiskal, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengelolaan keuangan di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisien. Oates (1993) juga menyatakan bahwa kemandirian fiskal meningkatkan efisien ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kurangnya kebijakan pemerataan yang terpusat dapat menyebabkan kebangkrutan daerah miskin (Thiessen 2003)

**Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2014-2018**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2014	8.82
2015	6.67
2016	7.49
2017	7.60
2018	8.39

Sumber: BPS Luwu Utara data diolah (2014-2018)

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara mengalami fluktuasi. Dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2014, Namun pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan pada tahun ini sektor kinerja lapangan usaha kelistrikan dan gas tidak menyumbangkan presentase pada laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan, namun tidak setinggi pada tahun 2014. Tahun-tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten mulai mengalami kenaikan yang cukup baik dikarenakan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberi efek laju pertumbuhan yang besar. Dan pada tahun 2018 angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara kembali berada di angka 8 persen.

Kebijakan kemandirian fiskal yang ditetapkan di Indonesia diharapkan dapat memacu pemerintah daerah menjadi lebih selektif dalam membiayai program pembangunannya. Kemandirian daerah dalam membiayai program pembangunan dengan PAD bisa diukur dengan indikator kemandirian fiskal. Salah satu pendapat yang mendasari pembangunan indikator ini adalah suatu daerah bisa saja memperoleh dana perimbangan yang kecil, namun pendelegasian fiskal di daerah tersebut akan dipandang cukup tinggi apabila pemerintah daerahnya mampu mendanai pengeluaran PAD yang dimilikinya (Wibowo 2008).

Pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan dua langkah strategis. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, seperti kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya pendidikan dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Perbaikan pada Pendidikan di harapkan mampu membawa

perubahan yang nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah, (Mardiasmo, 2002).

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk didalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, daerah yang tingkat kemandirian fiskalnya yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah (DJPK, 2011).

Pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah yang ada, dengan tujuan untuk mewujudkan kualitas pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kemiskinan di daerah itu sendiri. Dengan adanya kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, bisa dilihat sampai dimana tingkat kemandirian daerah tersebut. Semakin minim (rendah) ketergantungan dana dari pusat maka semakin nyata kualitas sumber daya daerah itu sendiri. Atau dengan kata lain tingkat kemandiriannya lebih baik dengan ditunjang oleh faktor-faktor pendapatan asli daerah dan berbagai sektor yang ada. (Anwar, Kumenaung dan Kawung, 2015)

Pemerintah daerah dengan kewenangan fiskal yang sedemikian luas sebagai hasil dari kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan kewenangan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan perbaikan sumber daya manusia di wilayahnya. Penentuan besarnya anggaran belanja khususnya belanja modal dan

target PAD sebagai indikator kemandirian fiskal daerah membuat pemerintah daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk memicu pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pembangunan senantiasa didasarkan pada potensi yang dimiliki suatu daerah. Dalam era kebijakan otonomi daerah, desentralisasi memegang peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan otonomi daerah. Desentralisasi sendiri adalah suatu penyerahan wewenang pemerintah oleh pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004).

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ketergantungan daerah terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%. (Kemenkeu 2019)

Ketergantungan fiskal terhadap pusat justru lebih parah terjadi pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Padahal, level kota/kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ironisnya lagi dominasi transfer dari pusat tidak diikuti dengan perbaikan pengelolaannya (governance). Riset empiris Bank Dunia (2001) menunjukkan tingginya ketergantungan pada transfer berbanding terbalik

dengan governansinya. Maksudnya, pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam mendayagunakan PAD daripada dana transfer yang diterima dari pusat.

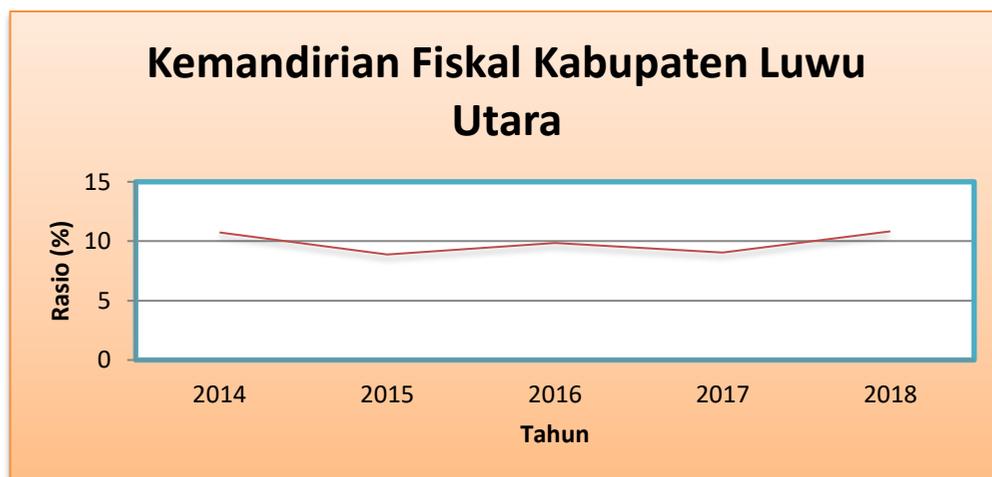
Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu menangani urusan domestik, dengan itu diharapkan pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro strategis. Dilain pihak, daerah otonom akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan (Haris, 2005).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Aziz, 1997).

Keuangan di Kabupaten Luwu Utara selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana angka dana perimbangan dari pusat kepada Kabupaten Luwu Utara terus meningkat setiap tahunnya namun, angka pendapatan asli daerah mengalami penurunan di tahun-tahun tertentu hal ini dikarenakan perubahan cuaca yang ekstrim sehingga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat di kabupaten luwu utara yang mana sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah petani atau penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Luwu Utara berasal dari sektor pertanian. Dalam mengitung rasio kemampuan keuangan di Kabupaten Luwu Utara digunakan perbandingan antara jumlah dana transfer terhadap total pendapatan daerah.

Daerah yang memiliki kemandirian fiskal yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang lebih tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah. Rasio kemandirian fiskal dapat dihitung menggunakan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah serta mengunakan rasio transfer kedaerah (termasuk dana perimbangan) terhadap total pendapatan daerah. Pada saat rasio dana perimbangan dari pusat terhadap pemerintah daerah lebih rendah dibandingkan dengan PAD yang didapatkan daerah tersebut, maka dapat dilihat bahwa daerah tersebut mampu mengelola sumber dayanya dengan efisien.

Gambar 2.1 Kemandirian Fiskal di Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Luwu Utara data diolah (2014-2018)

Pada gambar 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa derajat kemandirian fiskal di kabupaten luwu utara tergolong sangat rendah. Dari data 5 tahun terakhir dapat dilihat bahwa derajat kemandirian fiskal di Kabupaten Luwu Utara mengalami fluktuasi dimana kemandirian terbesar terjadi pada tahun 2018 mencapai 10.89%, dan terendah pada tahun 2015 yang hanya mencapai 8.89% menandakan peran pemerintah pusat masih dominan daripada pemerintah daerah. Rasio kemandirian

yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Utara masih sangat bergantung pada penerimaan pemerintah pusat.

Tabel 1.2 Kualifikasi Kemandirian Fiskal

Skala	Presentase PAD/TPD	Kualifikasi
1	0.00 – 10.00%	Sangat kurang
2	10.01 – 20.00%	kurang
3	20.01 – 30.00%	Sedang
4	30.01 – 40.00%	Cukup
5	40.1 – 50.00%	Baik
6	>50.00%	Sangat baik

Sumber: Tim fisipol UGM & Balitbang Depdagri dalam Triastuti (2005)

Rasio PAD terhadap total pengeluaran menyajikan tingkat independansi suatu daerah dalam membiayai pengeluaran APBD. Semakin besar rasio PAD terhadap total pengeluaran semakin besar pula tingkat otonomi di daerah tersebut. Semakin besar PAD yang di terima pemerintah daerah, maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat seyogyanya kian mengecil sehingga derajat desentralisasi fiskal semakin baik (Wibowo, 2008)

Selain mengenai masalah kemandirian daerah, Masalah Kemiskinan merupakan suatu fenomena permasalahan yang pada umumnya terjadi di setiap daerah dan merupakan persoalan kompleks. Karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan masalah rendahnya pendidikan. Badan Pusat Statistika (BPS) mendefinisikan miskin adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau layak bagi kehidupannya. Dilema kemiskinan menjadi

makin parah pada keluarga miskin. Dilema ini terjadi akibat kondisi yang sulit dalam mengakses jasa dan pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini disebut dengan kemiskinan kronis dibutuhkan serangkaian kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan (Dariwardani,2014). Pendidikan merupakan salah satu cara yang dapat menyelamatkan rakyat miskin dari kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan yang terjadi disuatu daerah akan menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan Indonesia.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan dapat dicapai dengan perbaikan pada tingkat pendidikan atau perbaikan pada mutu sumber daya manusia. Kualitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pendidikan dan kesehatan (Idin,2016). Diantara berbagai aspek ini, pendidikan dianggap yang memiliki peranan yang paling penting dalam membentuk kualitas manusia. Implikasinya, dengan semakin tinggi pendidikan, maka hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara nasional, semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Makin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja maka akan makin tinggi tingkat produktivitasnya dan dengan demikian juga akan makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah (Nugroho,2016).

Sesuai latar belakang diatas, maka penting bagi penulis untuk meneliti mengenai "**Analisis Pengaruh Kemandirian Fiskal, Kemiskinan dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah pada usulan penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah Kemandirian Fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara
2. Apakah Kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara
3. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah membuktikan secara empiris berbagai hal berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari sisi praktis maupun teoritis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi praktis diharapkan menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi entitas pemerintah untuk memperhatikan faktor-faktor pendorong kemandirian keuangan daerah dan,
2. Dari sisi teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi bahan masukan maupun referensi kepustakaan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik dengan pokok-pokok bahasan keuangan pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2012), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Sedangkan Boediono (1999), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Samuelson (1995) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari Produk Domestik Bruto potensial atau output dari suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang berarti perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan menggunakan indikator utama yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB sendiri merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara, sedangkan untuk tingkat wilayah provinsi maupun kabupaten/kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang

terjadi ditingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya.

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi di tambah dengan perubahan. Artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada satu tahun tertentu tidak hanya diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun.

Adanya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan disuatu daerah akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Menurut Sieber (1961) *regional economic growth is sustained increase in volume of an economic variabel of spatial subsystem of a nation.*

Pada defenisi diatas dapat dilihat bahwa pada dasarnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu terjadi jika variabel-variabel ekonomi yang dijadikan sebagai indikator mengalami perubahan dalam periode waktu tertentu, (Razak 2009). Dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka teori tempat sentral (central place theory) merupakan teori yang sering digunakan. Teori ini bermaksud untuk menghubungkan tempat sentral dengan hinterland-nya dan mendefinisikan tempat sentral sebagai suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk di hinterland-nya.

Teori-teori lainnya yang digunakan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah adalah: (1) teori sektor yang menunjukkan bahwa perkembangan suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu proses *evolusioner intern*; dan (2) teori basis ekspor yang menitik-beratkan permintaan terhadap ekspor daerah yang bersangkutan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap

perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan penggangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi daerah (Sirojuzilam 2008)

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah perubahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya diukur dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment* yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Richardson 2002).

2.1.2 Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat (World Bank 1994).

Sedangkan menurut Munir (2004) kemandirian fiskal yaitu kemampuan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian fiskal adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD yaitu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan dengan baik, hal ini berarti terdapat kemandirian fiskal pada suatu daerah.

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (desentralisasi fiskal) adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah .

Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah : a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah. b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap. Dari hal tersebut di atas, kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai

kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD

Menurut Reksodiprojo dalam Munir (2004,) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan menggunakan ukuran apa yang disebut derajat desentralisasi fiskal. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah.

2.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan daerah yang makmur, adil, dan sejahtera merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dibutuhkan pembiayaan yang jumlahnya tidaklah sangat sedikit. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai sumber sumber keuangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan daerah sehingga pada akhirnya pemerintah daerah tidak lagi

tergantung pada subsidi dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan yang potensial bagi pembangunan, (Saragih, 1996).

2.1.3 Kemiskinan

Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai kondisi individu penduduk atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara layak, seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal ini berhubungan dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Menurut BPS, penduduk miskin adalah mereka yang asupan kalorinya dibawah 2,100 kalori berdasarkan kategori food dan nonfood diukur menurut infrastruktur antara lain jalan raya, rumah, serta ukuran sosial berupa kesehatan dan pendidikan. Menurut ketentuan BPS kebutuhan makanan minimum per kapita penduduk yaitu sebanyak 2.100 kalori per hari. Mengingat bahan makanan penduduk berbeda-beda, maka ukuran konsumsinya dilihat dari jumlah rupiahnya.

Pendekatan garis kemiskinan lainnya yang dikemukakan oleh Sayogo (dalam Kuncoro 2004), menggunakan dasar harga beras. Menurut Sayogo, definisi kemiskinan adalah tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras. Berarti jumlah uang rupiah yang dibelanjakan setara dengan nilai beras sebanyak 20 kilogram untuk daerah perdesaan dan 30 kilogram daerah perkotaan.

Masalah kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (antara lain angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan, dan ekonomi (konsumsi/kapita). Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi

seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak dasar masyarakat miskin, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama, antara lain pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar, dan pendekatan objektif dan subjektif.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset dan alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara kaku standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri (Stepanek, 1985).

Indikator kemiskinan menurut Bappenas (2006) adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan

kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi.

Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam membahas masalah ini adalah mengidentifikasi apa sebenarnya yang dimaksud dengan miskin atau kemiskinan dan bagaimana mengukurnya. Konsep yang berbeda akan melahirkan cara pengukuran yang berbeda pula. Setelah itu, dicari faktor-faktor dominan (baik yang bersifat kultural maupun struktural) yang menyebabkan kemiskinan. Langkah berikutnya adalah mencari solusi yang relevan untuk memecahkan problem dengan cara merumuskan strategi mengentaskan kelompok miskin atau masyarakat miskin.

Kemiskinan menurut Sharp (1996), dari sisi ekonomi penyebabnya dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya alam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat pendidikan

dan kesehatan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati 2005).

2.1.4 Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk membentuk manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab, sehingga melahirkan generasi yang tangguh. Dalam undang-undang pendidikan indonesia No.20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 yang menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi pribadinya, pengendalian diri masyarakat, bangsa dan negara. Jadi pendidikan merupakan suatu proses pengembangan potensi manusia yang di laksanakan secara dinamis, sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam bahasa Indonesia, pendidikan berarti proses mendidik atau melakukan suatu kegiatan yang mengandung proses komunikasi pendidikan antara yang mendidik dan yang dididik. Melalui masukan-masukan kepada peserta didik yang secara sadar akan dicerna oleh jiwa, akal maupun raganya sehingga pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif) sesuai dengan yang dituju oleh pendidikan tersebut

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus dan tak pernah putus dari generasi kegenarsi didunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan latar belakang sosial setiap masyarakat tertentu (Tirtarahardja 2005)

Pendidikan, seperti sifatnya sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks, sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari generasi satu ke generasi yang lain. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai satu kegiatan yang sistematis dan sistematis terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik (Tirtarahardja 2005)

Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat tergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Harap dan Poerkatja, pendidikan adalah usaha yang secara sengaja dari orang tua yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya.

Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan.

Para masyarakat mengartikan pendidikan adalah pengajaran yang dilakukan di sekolah yang mana sekolah tersebut sebagai tempat terjadinya pengajaran atau pendidikan formal. Jadi pendidikan tidak seluruhnya terjadi di sekolah tetapi pendidikan bisa jadi dirumah yang mana orang tua yang menjadi gurunya.

Pendidikan adalah sebuah program yang mengandung komponen tujuan, proses belajar mengajar antara murid dan gurunya sehingga, akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) menjadi lebih baik, apalagi kita hidup di jaman

sekarang ini pendidikan sangatlah di perlukan karena pendidikan itu akan membawa kita tidak ketinggalan jaman tetapi kita bisa memilih mana yang baik dan yang tidak baik bagi kita.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan antara Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh dari kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya koefisien regresi dari variabel kemandirian fiskal. Pada peneliatian sebelumnya kemandirian fiskal memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara financial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya. Kemandirian Fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk pemerintah pusat. Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi desentralisasi fiskal) adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Semakin tinggi rasio PAD

terhadap total APBD mencerminkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik, sehingga mendukung pembangunan daerah sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Studi yang dilakukan oleh Suci (2013) terhadap Kabupaten/Kota di propovinsi banten mengemukakan bahwa kemandirian fiskal mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di provinsi banten. Penelitian tersebut membuktikan peningkatan kemandirian fiskal sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD.

Pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya tingkat kegiatan ekonomi pada suatu daerah yang kemudian akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan kemandirian daerah. Pertumbuhan dalam hal ini akan terjadi apabila masing-masing aspek dalam suatu daerah bekerja sama dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi seperti contoh dengan meningkatkan investasi maka ecara langsung jua akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Setiyawati, 2007)

2.2.2 Hubungan antara Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi adalah hubungan yang kompleks dan kontroversional. Secara umum, perumbuhan ekonomi adalah prakondisi bagi pengurangan kemiskinan. Namun ini tidaklah cukup, sebagaistuid telah mencoba menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dankemiskinan yang secara metodologi dapat dikelompokkan menjadi dua (Berardi dan Marzo, 2005). Kelompok pertama berfokus pada hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan pendapatan dan retibusi pendapatan. Penelitian ini merupakan bentuk dari hubungan kemiskinan dan perekonomian secara mikro dimana pertumbuhan

pendapatan dan distribusi pendapatan menjadi indikator dari perekonomian mikro, sedangkan kelompok kedua berfokus pada elastisitas kemiskinan terhadap PDB yang merupakan indikator dari perekonomian secara makro.

Siregar dan Wahyuniarti (2007) menemukan bahwa sektor industri dan pertanian dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Lebih jauh ditemukan pula dampak sumbangan sektor industri terhadap penurunan jumlah kemiskinan lebih besar 2,6 kali daripada dampak sumbangan sektor pertanian yang mengindikasikan bahwa industrialisasi yang dilakukan secara tepat dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan serta relatif besar pengaruhnya terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Zaman, dkk (2014) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen anti kemiskinan yang paling dominan. Penurunan kemiskinan yang cepat di Pakistan disebabkan oleh tingginya pertumbuhan sektor-sektor penghasil komoditas dan berkurangnya ketimpangan di perkotaan. Hal tersebut ditemukan melalui perhitungan menggunakan pro-poor growth index ditingkat sektoral. Dalam perhitungan memang ditemukan adanya sektor yang merupakan sentor anti kemiskinan dan ada juga yang tidak, namun secara menyeluruh pro-poor growth index menunjukkan secara keseluruhan pertumbuhan sektoral memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

2.2.3 Hubungan antara Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia

sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal suatu Negara (daerah). Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu Negara maupun daerah.

Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tingkat melek huruf yang rendah, pemerataan pendidikan yang rendah, serta standar proses pendidikan yang relatif kurang memenuhi syarat.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

2.3 Tinjauan Empiris

Fafurida, dkk (2016) dalam penelitian "*financial independence of regencies and cities in central java*" menunjukkan bahwa kemandirian finansial cenderung meningkat di semua daerah. Berdasarkan analisis independensi keuangan, Semarang dan Tegal memiliki ketergantungan finansial yang lebih rendah dengan pola hubungan konsultatif dibandingkan dengan 33 daerah lain yang memiliki tingkat ketergantungan finansial lebih tinggi dengan pola hubungan instruktif.

Anwar, dkk (2014) dalam penelitiannya berjudul “ analisis kemandirian fiskal di kabupaten/kota provinsi sulawesi Utara” menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini disebabkan masih rendahnya rasio kemandirian yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dan kemandirian fiskal di daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara , masih belum bisa di kategorikan mandiri, dimana rata-rata rasio kemandiriannya masih rendah.

Fitriani, dkk (2018) menulis tentang “ Analisis Kemandirian Fiskal Di Kabupaten Jayapura” menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal dan kontribusi dana transfer/ perimbangan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Jayapura masih sangat tinggi, sehingga kemandirian fiskalnya menjadi rendah. Dengan kondisi seperti itu maka kabupaten jayapura tergolong dalam pola hubungan yang instruktif terhadap pemerintah pusat, dimana peranan pusat masih sangat dominan dalam memenuhi belanja daerah.

Tarnoto, dkk (2015) dalam penelitian “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus Provinsi Banten Tahun 2011-2015” mengemukakan bahwa Berdasarkan nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah secara umum, daerah-daerah di Provinsi Banten dapat dikatakan sudah memiliki aspek kemandirian yang relatif memuaskan. Secara sektoral, daerah-daerah yang memiliki pola hubungan partisipatif serta aspek kemandirian daerahnya tinggi ini memiliki basis perekonomian di sektor perdagangan dan jasa, meski kontribusi sektor pertaniannya juga masih tinggi.

Supriyadi, dkk (2013) dalam jurnalnya “ Analisi Desentralisasi Fiskal Di Kabupaten Bungo” Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bungo adalah

sangat kurang. Untuk Pendapatan Asli Daerah, derajat desentralisasi fiskalnya rata-rata hanya sebesar 9,247 yang berarti sangat kurang, kemudian Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak walau derajat desentralisasi fiskalnya lebih tinggi yaitu sebesar 10,434 namun masih dalam katagori kurang. Selanjutnya untuk Sumbangan/Bantuan dari Provinsi dan Hibah Daerah malah menunjukkan nilai yang lebih rendah dari derajat desentralisasi fiskalnya Pendapatan Asli Daerah, yaitu hanya sebesar 3,187 (sangat kurang).

Qomariyah (2018) dalam penelitian “ Analisi Desentralisasi Fiskal Di Kabupaten Jombang” Untuk melihat kemandirian keuangan daerah dapat dianalisis dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan transfer. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah selama periode 2012 –2016 adalah sebesar 15,37% dengan kriteria kurang. Rasio kemandirian keuangan Kabupaten Jombang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Hasil terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 11,11% dan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 18,62%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah akan dibarengi dengan penurunan rasio ketergantungan keuangan daerah, dan sebaliknya.

Saputra, dkk (2015) dalam jurnalnya “Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi” Diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi selama lima tahun masih berada dalam skala interval yang sangat rendah. Berada dalam skala interval 0,00-10,00%, yakni dengan rata-rata per kabupaten hanya sebesar 4,91%. Keadaan ini menjelaskan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan daerah masih sangat rendah. Kondisi ini

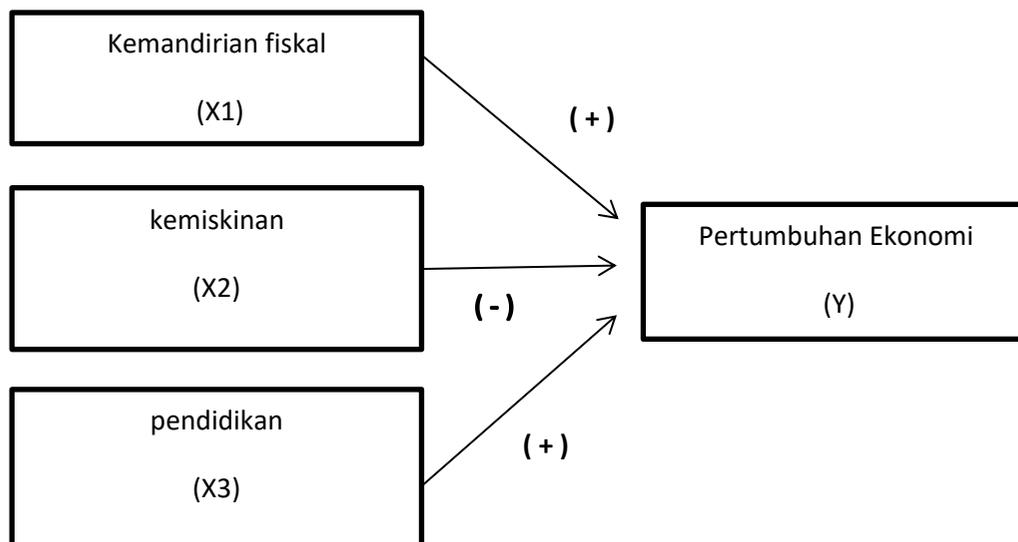
disebabkan karena PAD kabupaten dan kota di Provinsi Jambi relatif kecil dibandingkan dengan total pengeluaran daerahnya masing-masing.

2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini kerangka pemikiran perlu dijelaskan secara teoritis antar variabel bebas dan variabel terikat. Dan penjelasan dari berbagai teori yang telah ada maka pada penelitian kali ini menggabungkan beberapa variabel yang saling berkaitan.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kemandirian fiskal di Kabupaten Luwu Utara. Serta menunjukkan pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kemandirian Fiskal. Kemiskinan yang memiliki pengaruh negatif dan pendidikan yang berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal di Kabupaten Luwu Utara. Berikut merupakan kerangka pikir pada penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan awal atau sementara yang perlu diuji kembali kebenarannya mengenai masalah yang diteliti. Hipotesis selalu di rumuskan dalam pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (supranto 2001). Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Diduga bahwa Kemandirian Fiskal berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara
2. Diduga bahwa Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu utara
3. Diduga bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara